

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Oleh
Herning Suryo

Abstract

Community empowerment in fact intended to form an independent society not only economically but also of other aspects such as politics, education, social or things related to people's lives. With the expected empowerment of communities to apply independently, have a strong position for itself when the situation does not favor when a policy only benefit certain groups. Not an easy matter to change the situation of helplessness into a society that has no power because there are various constraints or factors inhibiting, people who had long been mired in shackles without power formed into an apathetic public, irresolute, lazy and did not have the confidence to such a change toward better direction.

Key Word: *community, empowerment, independent*

Pendahuluan

Topik topik yang menarik saat ini terkait dengan bagaimana mengupayakan masyarakat untuk lebih mandiri dan berdaya semakin menguat, apa yang kemudian di namakan dengan pemberdayaan masyarakat tentunya hal ini dimaksudkan bukan sebagai trend sesaat saja tetapi diinginkan sebagai usaha/kegiatan yang berlangsung terus menerus oleh berbagai pihak.

Begitu seringnya topik ini di dengar namun apakah begitu pula seringnya manfaat dari pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan ?. Menjadi pertanyaan menarik nampaknya saat kita tidak mendapatkan data-data yang konkrit dari berbagai pihak terkait hasil dari pemberdayaan masyarakat, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama (siapapun yang tergerak hatinya dengan masalah pemberdayaan masyarakat) bahwa semestinya manfaat pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan hasilnya bagi masyarakat.

Mengapa pemberdayaan masyarakat menjadi begitu penting bagi bangsa Indonesia ? Setelah konsep – konsep dan realisasi pembangunan orde pendahulu hanya menyisakan kesengsaraan bagi masyarakat maka sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam sebuah proses pembangunan tidak sebagai obyek tetap lebih sebagai subyek. Tentu saja dengan konsep ini membutuhkan syarat yang tidak mudah, bahwa keterlibatan masyarakat saja tidak cukup namun masyarakat yang mandiri yang mampu juga memberikan daya pikiran dan tenaga bagi terselenggaranya pembangunan menjadi keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.

Arti sebeanrnya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Pengertian dari pemberdayaan msyarakat juga dikatakan oleh Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidaknya.” Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” Menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai berikut.

“membantu klien memper-oleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.”

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya ditujukan untuk membentuk masyarakat yang mandiri tidak saja secara ekonomi tetapi juga menyangkut aspek lainnya seperti politik , pendidikan, sosial atau berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Dengan pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu berlaku mandiri,

memiliki posisi yang kuat bagi dirinya ketika situasi tidak berpihak manakala sebuah kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Bukan persoalan yang mudah memang untuk merubah situasi ketidakberdayaan menjadi masyarakat yang memiliki daya karena terdapat berbagai kendala atau faktor-faktor penghambatnya, masyarakat yang sudah lama terpuruk dalam belenggu tanpa daya terbentuk menjadi masyarakat yang apatis, peragu, malas dan tidak memiliki kepercayaan atas sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Memahami arti pemberdayaan masyarakat nampaknya masih berkisar terhadap persoalan ekonomi, memang tidak salah karena realitasnya kondisi masyarakat

Indonesia masih berada pada garis kemiskinan, namun mencari akar permasalahan dari kemiskinan juga bukan perkara yang mudah untuk dipecahkan, lebih dari itu masyarakat yang hidup pada suatu negara yang disebut-sebut negara yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya ini jauh dari upaya-upaya memakmurkan rakyatnya meski telah ada beberapa program yang dibuat atas dalih pemberdayaan masyarakat sebut saja PNPM, Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri pemerintah memang telah melakukan beberapa program yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat, namun hingga saat ini hasilnya tidak diketahui apakah telah mencapai tujuan dan sasaran yang tepat menjawab masalah tersebut oleh karenanya dibutuhkan suatu cara yang tepat untuk mengatasinya, tidak saja peran pemerintah yang lebih efektif dalam merancang programnya tetapi juga kepedulian atau lebih tepatnya sebagian masyarakat yang telah memiliki daya untuk turut serta memberikan pemikiran dan tenaganya.

Menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya;

“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Sedangkan menurut Sulistiyani (2004 : 80) Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Metode Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang tidak berdaya tidak terlepas dari kurang kesadarannya akan lingkungannya, dalam skala yang lebih besar adalah kurang memahami dinamika sosial dan politik Indonesia, ketika pemerintah tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan, masyarakat hanya merasa bahwa hal itu sudah layak terjadi tanpa mengerti apa yang sesungguhnya, bahwa situasi politik(masalah politik) yang beimbis pada munculnya aktor-aktor yang melahap kekayaan rakyat hanya dimengerti oleh segelintir orang pandai, bahwa kesadaran politik ditingkat rakyat yang lemah ternyata justru menjadi lahan yang subur untuk mengambil keuntungan dan rakyat hanya mampu menanggung akibatnya dari kejadian itu tanpa mengerti mengapa hal itu dapat terjadi, Sebuah kondisi yang memilukan ketika rakyat tidak tahu apa-apa karena pemahamannya yang sangat kurang terhadap kondisi negeri ini.

Menyandarkan harapan semata-mata kepada usaha pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat nampaknya menjadi tidak efektif, karena gerakan pemerintah seringkali hanya sebatas memberikan ikannya tapi sedikit yang memberikan cara memengertikan membuat kail yang tepat.

Sunyoto Usman (2003:40-47) memberikan beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, , yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

(empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Selanjutnya menurut Eko Darmawan Ada beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri yaitu:

1. Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangun dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangun dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan Masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan. Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

2. Pelatihan

Pendidikan disini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtangga, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran

masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan

3. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Masyarakat tidak mungkin diorganisir tanpa pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara rutin untuk mengambil keputusan-keputusan dan melihat apakah keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan. Wakil-wakil dari semua kelompok harus berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Selain pertemuan-pertemuan rutin, catatlah keputusan-keputusan yang telah diambil. Notulen itu akan dibacakan dalam pertemuan berikutnya untuk mengetahui apakah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut sudah melaksanakan tugasnya atau belum.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

4. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

Pada saat masyarakat merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka tidak akan mengatakan lagi, “kami tidak bisa”, tetapi mereka akan berkata “kami mampu!”. Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada kondisi seperti ini bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dsb. Hanya sebagai sarana perubahan sikap.

Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan masyarakat harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

5. Membangun Dinamika

Dinamika orang miskin berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Penutup

Persoalan pemberdayaan masyarakat adalah masalah bagaimana menyadarkan masyarakat terhadap kondisi diri sendiri yang selanjutnya dalam suatu proses pengembangan diri masyarakat harus mampu membuat dirinya mandiri dalam memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan atas dasar kemampuan diri. Oleh karena itu memberikan bekal pengetahuan bagi masyarakat menjadi syarat utama bagi terciptanya daya masyarakat yang pada proses berikutnya akan tercipta kemandirian dalam rangka menciptakan kondisi yang lebih baik lagi dari sebelumnya,

namun , yang lebih penting dari hal itu adalah bagaimana memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat untuk berani melakukan perubahan terhadap kondisi ketidak berdayaannya , sikap berani akan memberikan peluang bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran kreatif masyarakat itu sendiri yang pada gilirannya menjadikan masyarakat yang mandiri dan tidak tergantung lagi.

Daftar Pustaka

- Sulistiyani, Ambar Teguh.2004.Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Medika;Yogyakarta.
- Sumidiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 1998. Pemberdayaan Aparatur Daerah.Abdi Praja;Bandung.
- Drs. EKO DERMAWAN, PKM Banyuwangi